



LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM

Tahun Anggaran 2021
Semester I

ESELON 1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 12 Agustus 2021
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 12 Agustus 2021
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.766.990.891,- atau mencapai 163% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.1.081.139.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp.92.902.292.258,- atau mencapai 22% dari alokasi anggaran sebesar Rp.417.094.577.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021. Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.359.754.336.673,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.1.961.600,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.356.670.339.351,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.1.122.397.216,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.228.107.200,- dan Rp.1.358.526.229.473,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.1.435.309.290,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 79.835.005.532,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 78.399.696.242,-). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 382.359.826,- dan (Rp. 78.017.336.416,-) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (78.017.336.416,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.342.991.582.367,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.78.017.336.416,-) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp. 1.173.934.565,-) dan transaksi antar entitas senilai Rp. 94.725.918.087,- kenaikan/penurunan ekuitas Rp15.534.647.106,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 1.358.526.229.473,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMT I TA 2021		% thd Angg	SMT I TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.081.139.000	1.766.990.891	163,44	1.078.846.341
JUMLAH PENDAPATAN		1.081.139.000	1.766.990.891	163,44	1.078.846.341
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	29.523.295.000	18.219.610.659	61,71	14.219.929.288
Belanja Barang	B.4	197.624.766.000	52.744.454.395	26,69	33.528.058.004
Belanja Modal	B.5	189.946.516.000	21.938.227.204	11,55	5.540.966.990
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		417.094.577.000	92.902.292.258	22,27	53.288.954.282

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM NERACA PER 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.228.107.200	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNPB	C.4	-	55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(275.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.10	-	54.725.000
Persediaan	C.11	730.965.668	736.417.740
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	2.527.238	-
Jumlah Aset Lancar		1.961.600.106	791.142.740
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.13	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.15	78.412.740.045	77.320.563.531
Gedung dan Bangunan	C.16	242.611.045.704	239.994.199.536
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	9.395.644.993	9.444.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.972.643.997	2.972.643.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	20.776.586.146	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(86.498.389.534)	(77.647.443.838)
Jumlah Aset Tetap		1.356.670.339.351	1.341.084.676.219
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.884.302.990	1.835.302.990
Aset Lain-Lain	C.22	6.489.666.928	7.090.315.928
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(7.251.572.702)	(7.704.177.285)
Jumlah Aset Lainnya		1.122.397.216	1.221.441.633
JUMLAH ASET			
		1.359.754.336.673	1.343.097.260.592
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	1.228.107.200	-
Utang pada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	105.678.225
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.228.107.200	105.678.225
JUMLAH KEWAJIBAN			
		1.228.107.200	105.678.225
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.358.526.229.473	1.342.991.582.367
JUMLAH EKUITAS		1.358.526.229.473	1.342.991.582.367

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
DAN 30 JUNI 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.435.309.290	1.006.847.712
JUMLAH PENDAPATAN		1.435.309.290	1.006.847.712
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	18.219.610.659	14.219.929.288
Beban Persediaan	D.3	675.489.830	684.027.138
Beban Barang dan Jasa	D.4	34.582.306.533	25.530.944.747
Beban Pemeliharaan	D.5	4.999.583.412	4.392.908.508
Beban Perjalanan Dinas	D.6	12.489.999.454	3.587.107.664
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	8.868.290.644	6.523.225.715
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	(275.000)	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		79.835.005.532	54.938.143.060
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar	D.12	79.141.388	50.762.334
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Pendapatan dari Kegiatan Non		303.218.438	22.183.721
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		382.359.826	72.946.055
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(78.017.336.416)	(53.858.349.293)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(78.017.336.416)	(53.858.349.293)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
DAN 30 JUNI 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
EKUITAS AWAL	E.1	1.342.991.582.367	1.230.994.765.415
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(78.017.336.416)	(53.858.349.293)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		612.500	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(1.174.547.065)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(1.173.934.565)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	94.725.918.087	77.349.958.240
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		15.534.647.106	23.491.608.947
EKUITAS AKHIR	E.5	1.358.526.229.473	1.254.486.374.362

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang masyarakat, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan masyarakat, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual,

pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi

tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparaturnya Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135):

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1

5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah

untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester I tahun anggaran 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.081.139.000	1.766.990.891
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	1.081.139.000	1.766.990.891
Belanja		
Belanja Pegawai	29.523.295.000	18.219.610.659
Belanja Barang	197.624.766.000	52.744.454.395
Belanja Bantuan Sosial		0
Belanja Modal	189.946.516.000	21.938.227.204
Jumlah Belanja	417.094.577.000	92.902.292.258

B.1 PENDAPATAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp. 1.766.990.891,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.766.990.891,- atau mencapai 164.34% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.081.139.000,- Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	93.639.000	136.700.478	145,99
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	987.500.000	100,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		339.162.837	-
Pendapatan Lain-Lain	-	303.627.576	-
Jumlah	1.081.139.000	1.766.990.891	163,44

Realisasi Pendapatan Semester I TA 2021 mengalami penurunan sebesar 48.58% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan karena pengurangan kegiatan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP) menjadi 1 angkatan dan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan secara Jarak Jauh.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	136.700.478	188.610.002	137,97
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	869.000.000	88,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan		-	100,00
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda	339.162.837	-	-
Pendapatan Lain-lain	303.627.576	21.236.339	1329,75
Jumlah	1.766.990.891	1.078.846.341	63,79

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.79.141.388,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa 2 bus milik BPSDM .
- Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.57.599.090,-, terdiri dari satker BPSDM sebesar Rp. 2.247.090,- satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp. 312.000,- dan satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.55.000.000,-.
- Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.987.500.000,- untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan satu angkatan.
- Terdapat Realisasi Akun [425811] Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada satker BPSDM sebesar Rp. 339.162.837,-.

- Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.4.807.799,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.968,-.
 - Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.4.065.617,-
 - Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp. 36,-
 - Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.740.178,-.
- Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp. 31.692.000,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.29.192.000,- berupa pelunasan TP/TGR sebesar Rp.7.000.000,- dan pengembalian honor pelaksana PPK sebesar Rp.22.192.000.-
 - Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.2.500.000,-
- Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 266.718.639,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 266.718.639,-. Berupa
- Adanya Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 39.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker BPSDM sebesar Rp.39.000,-
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 370.138,-.

B.2. BELANJA

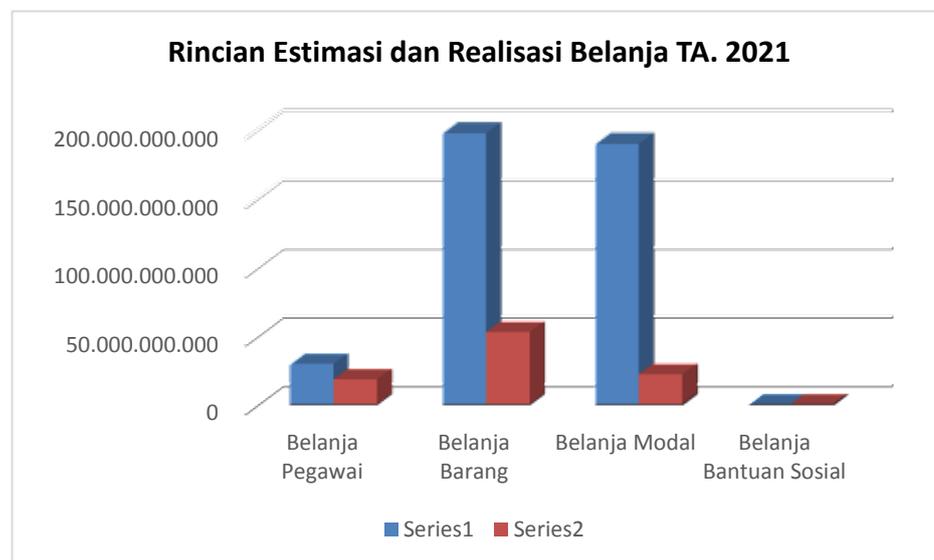
*Realisasi
Belanja
Rp.92.602.246.548,-*

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.92.602.246.548,- atau 22,2% dari anggaran belanja sebesar Rp. 53.288.954.282,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester I TA 2021

URAIAN	Semester I TA 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	29.523.295.000	18.219.610.659	61,71
Belanja Barang	197.624.766.000	52.744.454.395	26,69
Belanja Modal	189.946.516.000	21.938.227.204	11,55
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	417.094.577.000	92.902.292.258	22,27
Pengembalian Belanja		(300.045.710)	-
Total Belanja	417.094.577.000	92.602.246.548	22,2

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Semester I Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Berdasarkan Program
Semester I TA 2021*

PROGRAM	Semester I TA 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	417.094.577.000	92.902.292.258	22,27
Total Belanja	417.094.577.000	92.902.292.258	22,27

Dibandingkan dengan Semester I Tahun 2020, Realisasi Belanja pada Semester I TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 74,34%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja Modal BPSDM Hukum dan HAM pada TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 yaitu berupa belanja Modal pembelian aplikasi dan software yang akan digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta diklat dan para siswa dan siswi Taruna Politeknik.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN	REALISASI SMT I TA 2021	REALISASI SMT I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18.219.610.659	14.219.929.288	28,13
Belanja Barang	52.744.454.395	33.528.058.004	57,31
Belanja Modal	21.938.227.204	5.540.966.990	295,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	92.902.292.258	53.288.954.282	74,34

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.18.219.424.930,- Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.219.424.930,- dan Rp. 14.219.929.288,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 28.13% dari Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai

Semester I 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	REALISASI SMT I TA 2021	REALISASI SMT I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	17.807.419.659	14.219.929.288	25,23
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	412.191.000	-	-
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	18.219.610.659	14.219.929.288	28,13
Pengembalian Belanja Pegawai	(185.729)	(185.526)	0,11
Jumlah Belanja	18.219.424.930	14.219.743.762	28,13

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp. 52.698.334.895,- Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.698.334.895,- dan Rp. 33.528.058.004,-.

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2021 mengalami penurunan sebesar 57.18% dari Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pagu anggaran Belanja

Barang Semester I Tahun 2021 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2020 dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di masa pandemik berubah/mundur dari jadwal sehingga dilakukan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.

*Perbandingan Belanja Barang
Semester I TA 2021 dan Semester I 2020*

URAIAN	REALISASI SMT I TA 2021	REALISASI SMT I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	6.561.605.615	5.976.813.140	9,78
Belanja Barang Non Operasional	15.390.607.729	12.231.601.377	25,83
Belanja Persediaan	678.328.486	67.383.335	906,67
Belanja Jasa	12.630.093.189	7.182.827.730	75,84
Belanja Pemeliharaan	4.993.819.922	4.482.324.758	11,41
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.489.999.454	3.587.107.664	248,19
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	52.744.454.395	33.528.058.004	57,31
Pengembalian Belanja	(46.119.500)	(680.000)	
Jumlah Belanja	52.698.334.895	33.527.378.004	57,18

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.21.936.952.204,-

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.936.952.204,- dan Rp. 5.540.966.990,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 295.90% dibandingkan Semester I TA 2020 hal ini dikarenakan adanya, pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, pengadaan inventaris kantor serta pembelian Aplikasi yang ada di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN	REALISASI SMT II TA. 2020	REALISASI SMT II TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.042.385.714	4.958.135.020	(78,98)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.895.841.490	438.622.916	4663,96
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	-	144.209.054	0,00
Jumlah Belanja Kotor	21.938.227.204	5.540.966.990	295,93
Pengembalian	(1.275.000)	-	-
Jumlah Belanja	21.936.952.204	5.540.966.990	295,90

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMT I TA. 2021	REALISASI SMT I TA. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp.1.042.385.714,-, mengalami penurunan sebesar 78.98% bila dibandingkan dengan Semester I TA 2020 sebesar Rp. 4.958.135.020,-. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.450.433.500,-, Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp.158.050.000,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.296.828.214,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.124.674.000,-. Khusus pemasangan peralatan dan mesin Penanganan Pandemi di satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp. 12.400.000,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN	REALISASI SMT I TA. 2021	REALISASI SMT I TA. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.029.985.714	4.911.165.020	-79,03
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	12.400.000	46.970.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.042.385.714	4.958.135.020	-78,98
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.042.385.714	4.958.135.020	-78,98

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.20.895.841.490,- dan Rp. 438.622.916,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	SMT I TA. 2021	SMT I TA. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.776.586.146	438.622.916	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	119.255.344	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	20.895.841.490	438.622.916	4663,96
Pengembalian Belanja Modal	(1.275.000)	-	-
Jumlah Belanja		438.622.916	-100,00

Hal ini disebabkan adanya pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan dari satker BPSDM Hukum dan HAM

sebesar Rp.20.385.048.609,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.119.255.344,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp. 391.537.537,-.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	SMT I TA 2021	SMT I TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	100,00

Pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan **modal** untuk pengadaan / pembangunan **belanja modal lainnya** yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam akun **belanja modal** tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan **lain-lain** yaitu :

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2021	TA. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.1.228.107.200,- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.228.107.200,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Rekening Bank	697.800.000	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	530.307.200	-
Jumlah	1.228.107.200	-

Dengan rincian Tambahan Uang Persediaan Sebesar Rp.530.307,-.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0,- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Juni TA 2021 dan TA 2020*

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp. 0,-*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.109.450.000,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP Semester I TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNBP	-	55.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertag	-	(275.000)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETT)	-	54.725.000
Jumlah	-	109.450.000

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0,- Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR Semester I TA 2021 dan TA 2020

No	Nama	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp.0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar Rp.0,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Semester I TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-		-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,-

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
Semester I TA 2021 dan TA 2020

JENIS	TA. 2021	TA. 2020
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2021 dan 2020

JENIS	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp.730.965.668,-

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.730.965.668,- dan Rp.736,417,740,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

JENIS	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	657.704.068	407.508.534
Barang untuk Pemeliharaan	73.261.600	17.385.700
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	730.965.668	424.894.234

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dokumentasi dan BA Pemeriksaan Barang (stok opname persediaan) terlampir.

Tagihan
TP/TGR
Rp.0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Non
Lancar
Rp.0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp.1.089.000.068.
000,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.089.000.068.000,- dan Rp1.089.000.068.000,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020	Rp	1.089.000.068.000
Mutasi tambah:	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2021	Rp	1.089.000.068.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	Rp	1.089.000.068.000

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

*Peralatan dan
Mesin*
Rp.78.412.740.0
45,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.78.412.740.045,- dan Rp.77.320.563.531,- Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020	Rp 77.320.563.531
Mutasi tambah:	Rp 1.124.753.714
Pembelian	Rp 1.042.385.714
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	Rp 82.368.000
Mutasi kurang:	Rp 32.577.200
Transfer keluar	Rp 18.097.200
Reklasifikasi Aset	Rp 14.480.000
Penghapusan	Rp -
Saldo per 30 Juni 2021	Rp 78.412.740.045
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	Rp (53.574.582.670)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	Rp 24.838.157.375

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.532.801.500,-
Terdiri dari transfer masuk dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa laptop sebesar Rp.82.368.000,-
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp.170.450.000,-
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp.296.828.214,-
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp.124.674.000,-

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp.32.577.200,-

*Gedung dan
Bangunan
Rp.242.611.045.
704,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp.242.611.045.704,- dan Rp.239.994.199.536,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	239.994.199.536
Mutasi tambah:	3.803.257.344
Transfer Masuk	3.684.002.000
Pengembangan Nilai Aset	119.255.344
Mutasi kurang:	1.186.411.176
Reklasifikasi Gd dan Bangunan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.186.411.176
Saldo per 30 Juni 2021	242.611.045.704
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(27.895.365.541)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	214.715.680.163

- Terdapat Nilai mutasi tambah milik satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.3.684.002.000,- didapat dari :
 - Transfer masuk dari Direktorat Sekretariat Jenderal sebesar Rp.3.684.002.000,- berupa pagar untuk Politeknik di Tangerang.
- Penambahan Nilai Gedung milik satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.119.255.344,-.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.9.395.644.993,-*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.9.395.644.993,- dan Rp.9.444.644.933,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	9.444.644.993
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	49.000.000
Revaluasi Aset	49.000.000
Saldo per 30 Juni 2021	9.395.644.993
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(3.490.941.323)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	5.904.703.670

- Revaluasi Aset berupa jaringan sebesar Rp.49.000.000,- milik satker Politeknik Imigrasi berupa pengadaan Aplikasi Jaringan *Online Jurnal System* (OJS).

Aset Tetap

Lainnya

Rp.2.972.643.997,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp.2.972.643.997,- dan Rp.2.972.643.997,-.

Saldo per 30 Juni 2020	2.972.643.997
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2021	2.972.643.997
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2021	(1.537.500.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	1.435.143.997

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp.2.972.643.997,- (data terlampir) berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.351.026.622,-
- Satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.867.743.575,-
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.753.873.800,-

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.20.776.586.146,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.20.776.586.146,- dan Rp.0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.86.498.389.534,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing Rp. 86.498.389.534,- dan Rp.77.647.443.838,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	78.412.740.045	53.574.582.670	24.838.157.375
2	Gedung dan Bangunan	242.611.045.704	27.895.365.541	214.715.680.163
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.395.644.993	3.490.941.323	5.904.703.670
4	Aset Tetap Lainnya	2.972.643.997	1.537.500.000	1.435.143.997
Total		333.392.074.739	86.498.389.534	246.893.685.205

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak
Berwujud
Rp.1.884.302.990,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.884.302.990,- dan Rp.1.835.302.990,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
Semester I TA 2021*

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.884.302.990
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2021		Rp 1.884.302.990

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	Rp 1.835.302.990
Mutasi tambah:	Rp 49.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp 49.000.000
Transfer Masuk	Rp -
Saldo per 30 Juni 2021	Rp 1.884.302.990
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	Rp 1.067.695.765
Nilai Buku per 30 Juni 2021	Rp 816.607.225

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa software sebesar Rp.1.884.302.990,- yang dicatat sebagai asset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.926.852.500,- berupa :
 - a. barcode : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang berada di lingkungan BPSDM dan CBHRIS : aplikasi kediklatan sebesar Rp.81.875.000
 - b. Modul aplikasi Self assesment Rumah Belajar ASN Rp.88.350.000,-

- c. Modul aplikasi Self Service Rumah Belajar ASN Rp.83.900.000,-
 - d. Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp.88.800.000,-
 - e. Modul Aplikasi Learning Journey Rp.90.090.000,-
 - f. Modul Digital Library Rp.87.780.000,-
 - g. Aplikasi E-learning Rp.90.502.000,-
 - h. Modul Sertifikasi dan pelatihan Rp.93.857.000,-
 - i. Modul community of Practive Rp.88.660.000,-
 - j. modul aplikasi rumah belajar ASN Rp.82.445.000,-
 - k. Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar Rp.50.593.500,-
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.648.608.190,- berupa Software komputer pada laboratorium keimigrasian.
 - Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp.248.300.000,- berupa Aplikasi layanan Taruna pada bagian akademik dan ketarunaan sebagai sarana perizinan taruna keluar asrama dan kegiatan luar maupun dalam asrama, media informasi kedinasan POLTEKIP bagi taruna dan sarana layanan aduan.
 - Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.29.042.300,- berupa Aplikasi COP untuk Pelatihan diklat
 - Satker Badiklat Jawa Tengah Sebesar Rp.31.500.000 berupa aplikasi Badiklat Learning Center

Aset Lain-Lain

Rp.6.489.666.928,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp.6.489.666.928,- dan Rp.7.090.315.928,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	7.090.315.928
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dr penggunaan	14.480.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	615.129.000
Saldo per 30 Juni 2021	6.489.666.928
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2021	(6.183.876.937)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	305.789.991

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.7.251.572.702,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.7.251.572.702,- dan Rp.7.704.177.285,- Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.884.302.990	1.067.695.765	816.607.225
2	ATB Lainnya			-
	Jumlah	1.884.302.990	1.067.695.765	816.607.225
B	Aset Lainnya	6.489.666.928	6.183.876.937	305.789.991
	Jumlah	6.489.666.928	6.183.876.937	305.789.991
	Total	8.373.969.918	7.251.572.702	1.122.397.216

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.0,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan

HAM, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan bulan November dan Desember 2019 pada Balai Diklat Sulawesi Utara dan segera akan ditindaklanjuti.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp -

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 sebesar Rp.,- dan Rp.105.678.225,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Semester I TA 2021

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	Rp -	
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp -	
Badan Lainnya	Rp -	
Total	Rp -	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp.0,-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Semester I TA 2021 dan TA 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp.1.358.512.429.473,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.358.526.229.473,- dan Rp.1.342.991.582.367,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.1.435.309.290,-

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.1.435.309.290,- dan Rp.1.006.847.712,- Pendapatan tersebut terdiri dari

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.237.315	137.847.668	127,36
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000	869.000.000	88,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	339.162.837	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	409.138	44	0,01
Jumlah	1.435.309.290	1.006.847.712	70,15

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.18.219.610.659,-

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.18.219.610.659,- dan Rp.14.219.929.288,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020
Beban Gaji Pokok PNS	12.541.331.840	9.958.980.580
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(729)	(526)
Beban Pembulatan Gaji PNS	203.604	148.713
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	800.002.092	658.857.536
Beban Tunjangan Anak PNS	201.079.678	176.599.160
Beban Tunjangan Struktural PNS	552.250.000	445.930.000
Beban Tunjangan Fungsional PNS	988.775.000	736.920.000
Beban Tunjangan PPh PNS	96.063.834	43.906.065
Beban Tunjangan Beras PNS	642.872.340	458.678.760
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS		
Beban Uang Makan PNS	1.628.617.000	1.456.014.000
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	356.410.000	284.080.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(185.000)	(185.000)
Beban Uang Lembur	412.191.000	-
Jumlah	18.219.610.659	14.219.929.288

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.675.489.830,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.675.489.830,- dan Rp.684.027.138,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	675.489.830	684.027.138	(1,25)
Beban Persediaan pita cukai, materau, dan leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	675.489.830	684.027.138	(1,25)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp.34.582.306.533,-

Beban Barang dan jasa pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.34.582.306.533,- dan Rp.25.530.944.747,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	4.827.922.988	4.054.575.413	19
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.814.000	5.452.100	43
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	423.380.000	373.610.000	13
Beban Barang Operasional Lainnya	623.823.200	554.820.300	12
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(4.725.000)		-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi C	683.390.427	988.355.327	(31)
Beban Bahan	1.107.072.092	5.126.815.477	(78)
Beban Honor Output Kegiatan	324.595.000	286.120.000	13
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(1.140.000)	(680.000)	68
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13.484.820.700	6.806.444.000	98
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pande	(11.900.000)	9.701.900	(223)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Pen	487.509.937		-
Beban Langganan Listrik	(350.000)	975.504.912	(100)
Beban Langganan Telepon	1.022.101.318	14.699.915	6.853
Beban Langganan Air	12.063.016	585.450	1.960
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.055.075	222.029.530	(99)
Beban Sewa	1.006.197.100	3.273.307.923	(69)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	3.542.324.680		-
Beban Jasa Profesi	(2.155.000)	2.691.050.000	(100)
Beban Jasa Lainnya	6.900.975.000	5.650.000	122.041
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.450.000		-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	134.082.000	142.902.500	(6)
Jumlah	34.582.306.533	25.530.944.747	35

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.4.999.583.412,-

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.4.999.583.412,- dan Rp.4.392.908.508,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.389.822.550	3.471.747.627	(2)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	-	49.275.000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.127.430.241	724.389.181	56
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan M	(3.919.500)	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	486.250.121	147.496.700	230
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Jumlah	4.999.583.412	4.392.908.508	14

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.12.489.999.454,-

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Januari 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.12.489.999.454,- dan Rp.3.587.107.664,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	11.690.233.454	3.349.999.064	248,96
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(21.930.000)	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	206.480.000	185.930.000	11,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.718.000	4.750.000	715,12
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	576.498.000	46.428.600	0,00
Jumlah	12.489.999.454	3.587.107.664	248,19

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial
Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.8.868.290.644,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.868.290.644,- dan Rp.6.523.225.715,-. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.595.851.734	3.085.249.937	49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.675.614.571	2.961.478.663	24
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	425.633.368	425.633.368	-
Beban Penyusutan Irigasi	9.904.429	9.904.429	-
Beban Penyusutan Jaringan	5.078.125	5.078.125	-
Beban Amortisasi Software	144.028.287	22.484.375	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	12.180.130	13.396.818	-
Jumlah	8.868.290.644	6.523.225.715	36

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp.275.000,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp.275.000,-) dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	(275.000)	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	(275.000)	-	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

*Beban Lain-lain
Rp.0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.382.359.826,-*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Semester
I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79.141.388	50.762.334	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	303.218.438	27.133.321	1017,51
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	4.949.600	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	382.359.826	72.946.055	424,17

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2020.*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp.911.619,-, terdiri dari :
 - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.1.968,-
 - b. Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp.36,-
 - c. Politeknik Imigrasi Rp 4.065.617,-
 - d. Balai Diklat Sulawesi Utara Rp. 740.178,-
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp.110.267.881,- terdiri dari :
 - a. Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp. 2.500.000,-
 - b. Politeknik Imigrasi Rp.29.192.000,-
3. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal (425913) sebesar Rp.266.718.639,-, dari Balai Diklat Jawa Tengah

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa
Rp.0,-

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa
Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020*

URAIAN	SMT I TH 2021	SMT I TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.1.342.991.582.367,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.342.991.582.367,- dan Rp.1.230.994.765.415,-.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
Rp.78.017.336.416,-

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah defisit sebesar Rp.78.017.336.416,- dan Rp.53.858.349.293,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp.0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,-.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi Reklasifikasi Aset Rp.612.50,- Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 612.500,- dan Rp0,00. Dari Satker BPSDM Hukum dan HAM berupa reklasifikasi atas Aset Tak Berwujud menjadi software pada BPSDM Hukum dan HAM.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,- Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan 0. Terdapat selisih di satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan untuk Tanah, Gedung dan Bangunan berupa tanah seluas 2.559m² dan bangunan seluas 2.425m² berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp.1.174.547.065,-) Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar (Rp.1.174.547.065,-) dan Rp.0,-. Koreksi Nilai Aset Non revaluasi didapat dari satker Politeknik ilmu Pemasaryakatan untuk Tanah, Gedung dan Bangunan berupa tanah seluas 2.559m² dan bangunan seluas 2.425m² berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi.

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp.0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp.94.725.918.087,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.94.725.918.087,- dan Rp.77.349.958.240,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.766.990.891)
Ditagihkan ke Entitas Lain	92.902.292.258
Transfer Masuk	3.608.713.920
Transfer Keluar	(18.097.200)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	94.725.918.087

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp.1.766.990.891,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.92.902.292.258,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 3.608.713.920,- sedangkan Transfer Keluar sebesar (Rp.18.097.200,-).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp.0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.1.358.526.229.4
73,-

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.358.526.229.473,- dan Rp.1.254.486.374.362,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada Eselon I BPSDM Hukum dan HAM tercatat pada Jurnal Umum sebagai gedung dan bangunan belum diregister dikarenakan kesalahan penggunaan akun aset sehingga dilakukan koreksi nilai aset non revaluasi dengan rincian sebagai berikut:
 - BPSDM Hukum dan HAM terdapat Jurnal Tidak Lazim sebesar Rp.1.275.000 atas pengembalian honor pokja pembangunan Politeknik di Tangerang.

2. Terdapat Persediaan yang Belum Diregister akun 117911 sebesar Rp.2.527.238 dikarenakan kesalahan penggunaan akun yang selanjutnya akan dilakukan ralat akun dengan rincian sebagai berikut :
 - BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.658.380 atas pembelian barang ekstrakomptabel berupa Kipas Angin dua unit Rp.550.000,- dan Meja Lipat 3 unit Rp.1.108.380,-
 - Balai Diklat Jawa Tengah Rp.868.858,- atas pembelian Clinical Thermometer satu buah.

3. Terdapat Pagu Minus sebesar Rp.7.902.770,- pada akun belanja 511125, 511124 dan 521241 dikarenakan belum dilakukan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - BPSDM Hukum dan HAM Akun 511125 sebesar Rp.4.438.214 dan akun 521241 sebesar Rp.787.228,-
 - Balai Diklat Jawa Tengah akun 511124 sebesar Rp.2.450.000
 - Balai Diklat Sulawesi Utara akun 511125 sebesar Rp.227.328,-

4. Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.79.141.388,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa 2 bus milik BPSDM Hukum dan HAM.
- Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.57.599.090,-, terdiri dari satker BPSDM sebesar Rp. 2.247.090,- satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp. 312.000,- dan satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.55.000.000,-.
- Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.987.500.000,- untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan satu angkatan.
- Terdapat Realisasi Akun [425811] Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 339.162.837,-.
- Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.4.807.799,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.968,-.
 - Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.4.065.617,-
 - Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp. 36,-
 - Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.740.178,-.

- Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp. 31.692.000,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.29.192.000,- berupa pelunasan TP/TGR sebesar Rp.7.000.000,- dan pengembalian honor pelaksana PPK sebesar Rp.22.192.000.-
 - Satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.2.500.000,-
- Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 266.718.639,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 266.718.639,-. berupa
- Adanya Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 39.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker BPSDM sebesar Rp.39.000,-
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 370.138,-

5. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.55.000.000,- untuk sewa Gedung dan Bangunan milik satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sesuai Surat Penyelesaian piutang sewa gedung STIH Litigasi (tindak lanjut BPK). Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.1-KU.05.01-04 tanggal 1 Februari 2021 karena Surat Perjanjian Sewa Sementara Tahun 2016 belum diperbaharui dan berdasarkan nilai perhitungan KPKNL terjadi perubahan penetapan biaya sewa. Yayasan Pengayoman Warga Kemeterian Hukum dan HAM telah melakukan pembayaran untuk menyelesaikan piutang tersebut untuk periode 2016 – 2019 ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Nomor NTPN BA94555DEDCFLN pada tanggal 11 Februari 2021 telah selesai dibayarkan.

6. Aset Tetap pada POLTEKIP berupa tanah seluas 2.559m² dan bangunan seluas 2.425m² berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi yang saat ini dalam proses penagihan uang sewanya (Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.I-PW.01-16 tanggal 30 Oktober 2019). Berdasarkan SEK-53.PB.04.02 tanggal 2 April Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dengan Nomor NTPN 534007QLTJRLB12 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
7. Koreksi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas gedung dan bangunan karena kelebihan bayar yaitu pada
 - Satker BPSDM sebesar Rp.849.107.837,06,-
 - Pengawasan pembangunan gedung Politeknik sebesar Rp.201.924.375,-
 - Perencanaan pembangunan gedung Politeknik sebesar Rp.510.572.600,-
 - Pembangunan Gedung Politeknik sebesar Rp.122.756.446,01,- dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp.13.854.416,05,-
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.197.905.490,-
 - Pengawasan Pembangunan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp.64.545.232,-
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Gedung Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp.133.360.258,70,-
- c. Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.86.226.525,-
 - Duplikasi bukti pertanggungjawaban belanja percetakan pada Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) sebesar Rp.58.995.400,-
 - Kelebihan pembayaran atas belanja fotocopy dan pembelian ATK pada Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) sebesar Rp.27.231.125,-

- d. Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.1.250.000.000,- berupa
 - o Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) tidak tertib dan terdapat kekurangan kas sebesar Rp.1.250.000.000,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
 - a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
 - b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
 - c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
 - d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2021.

II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2021		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	6.594.608.000	683.390.427	10,36
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6.594.608.000	683.390.427	10,36
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	7.235.618.000	487.159.937	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7.235.618.000	487.159.937	10,36
5218	Belanja Barang Persediaan			
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	249.440.000	202.913.239	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	249.440.000	202.913.239	10,36
5221	Belanja Jasa			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.228.855.000	134.082.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2.228.855.000	134.082.000	10,36
5231	Belanja Pemeliharaan			
521134	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi	-	-	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	-	-	0,00
53	BELANJA MODAL			
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	13.000.000	12.400.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	13.000.000	12.400.000	95,38
	JUMLAH BELANJA	16.321.521.000	1.519.945.603	9,31

- Realisasi Belanja barang operasional – penanganan Pandemi (521131) Rp.683.390.427,- terdiri dari : Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.501.591.899,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.56.783.455,-, Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.119.000.000,-, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp.1.166.600,-, dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp.4.848.400,-.
- Realisasi Belanja barang non operasional – penanganan Pandemi (521241) Rp. 487.509.937 ,-, berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.158.841.002,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.77.490.500,- dengan pengembalian belanja sebesar Rp.350.000,-, satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.87.923.285,-, satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.51.782.000,-, satker Badiklat Jawa

Tengah Rp.93.473.150,- dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp.18.000.000,-.

- Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi (522192) sebesar Rp. 134.082.000 ,- berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.74.770.000,-, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.11.016.000,-, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp.37.451.000,- dan satker Balai Diklat Sulawesi Utara Rp.10.845.000,-.
- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi (532119) sebesar Rp.12.400.000,- berasal dari Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.12.400.000,-.

III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:17 PM
lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,228,107,200	0	1,228,107,200	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	55,000,000	(55,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(275,000)	275,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	54,725,000	(54,725,000)	(100.00)
Persediaan	730,965,668	736,417,740	(5,452,072)	(0.74)
Persediaan yang Belum Diregister	2,527,238	0	2,527,238	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,961,600,106	791,142,740	1,170,457,366	147.95
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	78,412,740,045	77,320,563,531	1,092,176,514	1.41
Gedung dan Bangunan	242,611,045,704	239,994,199,536	2,616,846,168	1.09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,395,644,993	9,444,644,993	(49,000,000)	(0.52)
Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	2,972,643,997	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20,776,586,146	0	20,776,586,146	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(86,498,389,534)	(77,647,443,838)	(8,850,945,696)	11.40
JUMLAH ASET TETAP	1,356,670,339,351	1,341,084,676,219	15,585,663,132	1.16
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,884,302,990	1,835,302,990	49,000,000	2.67
Aset Lain-lain	6,489,666,928	7,090,315,928	(600,649,000)	(8.47)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,251,572,702)	(7,704,177,285)	452,604,583	(5.87)
JUMLAH ASET LAINNYA	1,122,397,216	1,221,441,633	(99,044,417)	(8.11)
JUMLAH ASET	1,359,754,336,673	1,343,097,260,592	16,657,076,081	1.24
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima Dimuka	0	105,678,225	(105,678,225)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	1,228,107,200	0	1,228,107,200	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,228,107,200	105,678,225	1,122,428,975	1,062.12
JUMLAH KEWAJIBAN	1,228,107,200	105,678,225	1,122,428,975	1,062.12
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,358,526,229,473	1,342,991,582,367	15,534,647,106	1.16
JUMLAH EKUITAS	1,358,526,229,473	1,342,991,582,367	15,534,647,106	1.16
JUMLAH EKUITAS	1,358,526,229,473	1,342,991,582,367	15,534,647,106	1.16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,359,754,336,673	1,343,097,260,592	16,657,076,081	1.24

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER JUNI 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:06 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	324,192,284,742	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	685,851,891	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	93,639,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Yang Dialokasikan	987,500,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	17,621,044,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	326,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,883,394,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	351,538,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	985,320,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,414,740,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	117,944,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,055,882,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	3,685,688,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	728,133,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,679,286,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	12,025,008,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	39,800,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,112,625,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,534,461,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,594,608,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	21,056,740,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,036,185,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	30,604,782,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	7,235,618,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	923,818,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	281,444,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	249,440,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,148,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	72,120,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	22,800,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,218,107,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	7,224,634,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	32,308,000,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	257,591,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,228,855,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6,983,475,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,017,559,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,766,894,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	51,188,920,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER JUNI 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:06 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,403,250,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	477,024,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,613,008,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10,764,209,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	13,000,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	178,984,237,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	185,070,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	57,598,090
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,482,017
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,692,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	591,399,459
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,541,331,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	203,604	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	729
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	800,002,092	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	201,079,678	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	552,250,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	988,775,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	96,063,834	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	642,872,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,628,617,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	356,410,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	412,191,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,827,922,988	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,814,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	423,380,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	623,823,200	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	4,725,000
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	683,390,427	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,107,072,092	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	324,595,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,140,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,484,820,700	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER JUNI 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:06 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	11,900,000
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	487,509,937	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	350,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	398,404,932	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	77,010,315	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	202,913,239	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,022,101,318	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	12,063,016	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,055,075	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,006,197,100	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,542,324,680	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,900,975,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,155,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	12,450,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	134,082,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,389,822,550	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	480,486,631	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,127,430,241	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,919,500
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,690,233,454	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	21,930,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	206,480,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,718,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	576,498,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,029,985,714	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	12,400,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,777,861,146	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,275,000
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	119,255,344	0
JUMLAH			418,909,148,120	418,909,148,120

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER JUNI 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:06 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	697,800,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	530,307,200	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	657,704,068	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	73,261,600	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	2,527,238	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	78,412,740,045	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	242,611,045,704	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	20,776,586,146	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	53,574,582,670
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	27,895,365,541
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,551,077,091
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	79,235,432
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	860,628,800
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	1,884,302,990	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6,489,666,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,183,876,937
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,067,695,765
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,228,107,200
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	92,902,292,258
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,766,990,891	0
0.0	313211	Transfer Keluar	18,097,200	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,608,713,920
0.0	391111	Ekuitas	0	1,342,991,582,367
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,174,547,065	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	612,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	108,276,315
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,482,017

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER JUNI 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:06 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,692,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	591,399,459
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	12,541,331,840	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	203,604	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	729
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	800,002,092	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	201,079,678	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	552,250,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	988,775,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	96,063,834	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	642,872,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,628,617,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	356,410,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	412,191,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,827,922,988	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,814,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	423,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	623,823,200	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	4,725,000
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	683,390,427	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,107,072,092	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	324,595,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	1,140,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,484,820,700	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	11,900,000
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	487,509,937	0
3.1	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	350,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,022,101,318	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,063,016	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,055,075	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,006,197,100	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,542,324,680	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,900,975,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	2,155,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	12,450,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	134,082,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,389,822,550	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
 UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 09/11/2021 1:06 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,127,430,241	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,919,500
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,690,233,454	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	21,930,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	206,480,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,718,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	576,498,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,595,851,734	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,675,614,571	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	425,633,368	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	144,028,287	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	12,180,130	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	675,489,830	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	486,250,121	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	275,000
JUMLAH			1,536,345,519,826	1,536,345,519,826

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 09/11/2021

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	567,752,386	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	168,665,354	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	77,320,563,531	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	239,994,199,536	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,227,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	48,974,750,936
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	24,084,255,001
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,125,443,723
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	69,331,003
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	856,163,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	1,835,302,990	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,090,315,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,780,509,807
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	923,667,478
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	105,678,225
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,342,991,582,367
JUMLAH			1,428,449,156,715	1,428,449,156,715

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
 Tanggal : 09/11/21 1:07 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,081,139,000	1,766,990,891	(685,851,891)	163	849,625,000	1,078,846,341	(229,221,341)	127
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,081,139,000	1,766,990,891	(685,851,891)	163	849,625,000	1,078,846,341	(229,221,341)	127
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	29,523,295,000	18,219,610,659	11,303,684,341	62	25,264,833,000	14,219,929,288	11,044,903,712	56
	BELANJA BARANG	197,624,766,000	52,744,454,395	144,880,311,605	27	109,879,752,000	33,528,058,004	76,351,693,996	31
	BELANJA MODAL	189,946,516,000	21,938,227,204	168,008,288,796	12	96,203,405,000	5,540,966,990	90,662,438,010	6
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	417,094,577,000	92,902,292,258	324,192,284,742	22	231,347,990,000	53,288,954,282	178,059,035,718	23
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/11/21 1:05 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388	0	79,141,388	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93,639,000	57,598,090	0	57,598,090	61.51
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	93,639,000	136,739,478	0	136,739,478	146.03
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	987,500,000	0	987,500,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	987,500,000	0	987,500,000	100
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,482,017	0	14,482,017	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	14,482,017	0	14,482,017	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799	0	4,807,799	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,692,000	0	31,692,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	591,399,459	0	591,399,459	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138	0	370,138	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	628,269,396	0	628,269,396	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,081,139,000	1,766,990,891	0	1,766,990,891	163.44
	JUMLAH PENDAPATAN	1,081,139,000	1,766,990,891	0	1,766,990,891	163.44

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/11/21 1:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,186,843,000	17,621,044,000	12,541,331,840	0	12,541,331,840	71.17	5,079,712,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	326,000	326,000	203,604	729	202,875	62.23	123,125
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,893,394,000	1,883,394,000	800,002,092	0	800,002,092	42.48	1,083,391,908
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	347,414,000	351,538,000	201,079,678	0	201,079,678	57.2	150,458,322
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	985,320,000	985,320,000	552,250,000	0	552,250,000	56.05	433,070,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,398,540,000	1,414,740,000	988,775,000	0	988,775,000	69.89	425,965,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	117,944,000	117,944,000	96,063,834	0	96,063,834	81.45	21,880,166
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,034,643,000	1,055,882,000	642,872,340	0	642,872,340	60.88	413,009,660
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,615,084,000	3,685,688,000	1,628,617,000	0	1,628,617,000	44.19	2,057,071,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	710,228,000	728,133,000	356,410,000	185,000	356,225,000	48.92	371,908,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	27,289,736,000	27,844,009,000	17,807,605,388	185,729	17,807,419,659	63.95	10,036,589,341
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,079,259,000	1,679,286,000	412,191,000	0	412,191,000	24.55	1,267,095,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,079,259,000	1,679,286,000	412,191,000	0	412,191,000	24.55	1,267,095,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	28,368,995,000	29,523,295,000	18,219,796,388	185,729	18,219,610,659	61.71	11303684341
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,924,952,000	12,025,008,000	4,827,922,988	0	4,827,922,988	40.15	7,197,085,012
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,800,000	39,800,000	7,814,000	0	7,814,000	19.63	31,986,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,080,465,000	1,112,625,000	423,380,000	0	423,380,000	38.05	689,245,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,182,286,000	1,534,461,000	623,823,200	4,725,000	619,098,200	40.35	915,362,800
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	44,720,000	6,594,608,000	683,390,427	0	683,390,427	10.36	5,911,217,573
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	12,272,223,000	21,306,502,000	6,566,330,615	4,725,000	6,561,605,615	30.82	14,744,896,385
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	47,995,932,000	21,056,740,000	1,107,072,092	0	1,107,072,092	5.26	19,949,667,908
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,284,430,000	2,036,185,000	324,595,000	1,140,000	323,455,000	15.89	1,712,730,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,533,262,000	30,604,782,000	13,484,820,700	11,900,000	13,472,920,700	44.02	17,131,861,300
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,209,450,000	7,235,618,000	487,509,937	350,000	487,159,937	6.73	6,748,458,063
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	109,023,074,000	60,933,325,000	15,403,997,729	13,390,000	15,390,607,729	25.28	45,542,717,271
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,755,534,000	923,818,000	398,404,932	0	398,404,932	43.13	525,413,068
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	10,100,000	281,444,000	77,010,315	0	77,010,315	27.36	204,433,685
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	7,965,000	249,440,000	202,913,239	0	202,913,239	81.35	46,526,761
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,773,599,000	1,454,702,000	678,328,486	0	678,328,486	46.63	776,373,514

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/11/21 1:07 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,181,000,000	2,148,000,000	1,022,101,318	0	1,022,101,318	47.58	1,125,898,682
522112	Belanja Langganan Telepon	87,600,000	72,120,000	12,063,016	0	12,063,016	16.73	60,056,984
522113	Belanja Langganan Air	19,200,000	22,800,000	2,055,075	0	2,055,075	9.01	20,744,925
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,728,441,000	3,218,107,000	1,006,197,100	0	1,006,197,100	31.27	2,211,909,900
522141	Belanja Sewa	10,095,892,000	7,224,634,000	3,542,324,680	0	3,542,324,680	49.03	3,682,309,320
522151	Belanja Jasa Profesi	21,272,100,000	32,308,000,000	6,900,975,000	2,155,000	6,898,820,000	21.35	25,409,180,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	526,193,000	257,591,000	12,450,000	0	12,450,000	4.83	245,141,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	777,750,000	2,228,855,000	134,082,000	0	134,082,000	6.02	2,094,773,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,688,176,000	47,480,107,000	12,632,248,189	2,155,000	12,630,093,189	26.61	34,850,013,811
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,523,010,000	6,983,475,000	3,389,822,550	0	3,389,822,550	48.54	3,593,652,450
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	640,373,000	1,017,559,000	480,486,631	0	480,486,631	47.22	537,072,369
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,242,182,000	2,766,894,000	1,127,430,241	3,919,500	1,123,510,741	40.61	1,643,383,259
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,405,565,000	10,767,928,000	4,997,739,422	3,919,500	4,993,819,922	46.41	5,774,108,078
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66,767,699,000	51,188,920,000	11,690,233,454	21,930,000	11,668,303,454	22.79	39,520,616,546
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,981,400,000	1,403,250,000	206,480,000	0	206,480,000	14.71	1,196,770,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,500,000	477,024,000	38,718,000	0	38,718,000	8.12	438,306,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	307,320,000	2,613,008,000	576,498,000	0	576,498,000	22.06	2,036,510,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,093,919,000	55,682,202,000	12,511,929,454	21,930,000	12,489,999,454	22.47	43,192,202,546
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	234,256,556,000	197,624,766,000	52,790,573,895	46,119,500	52,744,454,395	26.71	144880311605
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	641,750,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	641,750,000	0	0	0	0	0	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,479,000,000	10,764,209,000	1,029,985,714	0	1,029,985,714	9.57	9,734,223,286
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	0	13,000,000	12,400,000	0	12,400,000	95.38	600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,479,000,000	10,777,209,000	1,042,385,714	0	1,042,385,714	9.67	9,734,823,286
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213,642,767,000	178,984,237,000	20,777,861,146	1,275,000	20,776,586,146	11.61	158,207,650,85
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	292,634,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	185,070,000	119,255,344	0	119,255,344	64.44	65,814,656
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	213,935,401,000	179,169,307,000	20,897,116,490	1,275,000	20,895,841,490	11.66	158,273,465,510

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
 TINGKAT ESELON I
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
 ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 09/11/21 1:07 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	220,056,151,000	189,946,516,000	21,939,502,204	1,275,000	21,938,227,204	11.55	168008288796
	JUMLAH BELANJA	482,681,702,000	417,094,577,000	92,949,872,487	47,580,229	92,902,292,258	22.29	324,192,284,742

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/11/21 1:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,720,000	6,594,608,000	683,390,427	0	683,390,427	10.36	5,911,217,573
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	44,720,000	6,594,608,000	683,390,427	0	683,390,427	10.36	5,911,217,573
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,209,450,000	7,235,618,000	487,509,937	350,000	487,159,937	6.73	6,748,458,063
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,209,450,000	7,235,618,000	487,509,937	350,000	487,159,937	6.74	6,748,458,063
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7,965,000	249,440,000	202,913,239	0	202,913,239	81.35	46,526,761
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,965,000	249,440,000	202,913,239	0	202,913,239	81.35	46,526,761
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	777,750,000	2,228,855,000	134,082,000	0	134,082,000	6.02	2,094,773,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	777,750,000	2,228,855,000	134,082,000	0	134,082,000	6.02	2,094,773,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,039,885,000	16,308,521,000	1,507,895,603	350,000	1,507,545,603	9.25	14800975397
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	13,000,000	12,400,000	0	12,400,000	95.38	600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	13,000,000	12,400,000	0	12,400,000	95.38	600,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	13,000,000	12,400,000	0	12,400,000	95.38	600000
	JUMLAH BELANJA	2,039,885,000	16,321,521,000	1,520,295,603	350,000	1,519,945,603	9.31	14,801,575,397

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 09/11/21 1:05 AM
Halaman : 1
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,110,628,470	1,006,847,712	103,780,758	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,110,628,470	1,006,847,712	103,780,758	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,110,628,470	1,006,847,712	103,780,758	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	18,219,610,659	14,219,929,288	3,999,681,371	-
Beban Persediaan	675,489,830	684,027,138	(8,537,308)	-
Beban Barang dan Jasa	34,582,306,533	25,530,944,747	9,051,361,786	-
Beban Pemeliharaan	4,999,583,412	4,392,908,508	606,674,904	-
Beban Perjalanan Dinas	12,489,999,454	3,587,107,664	8,902,891,790	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 09/11/21 1:05 AM
Halaman : 2
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,868,290,644	6,523,225,715	2,345,064,929	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(275,000)	0	(275,000)	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	79,835,005,532	54,938,143,060	24,896,862,472	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(78,724,377,062)	(53,931,295,348)	(24,793,081,714)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	79,141,388	50,762,334	28,379,054	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79,141,388	50,762,334	28,379,054	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	627,899,258	22,183,721	605,715,537	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	627,899,258	27,133,321	600,765,937	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,949,600	(4,949,600)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	707,040,646	72,946,055	634,094,591	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(78,017,336,416)	(53,858,349,293)	(24,158,987,123)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(78,017,336,416)	(53,858,349,293)	(24,158,987,123)	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Lap : Lpe.es1
Tanggal : 09/11/21 1:05 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_es1

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,342,991,582,367	1,230,994,765,415	111,996,816,952	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(78,017,336,416)	(53,858,349,293)	(24,158,987,123)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,173,934,565)	0	(1,173,934,565)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	612,500	0	612,500	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,174,547,065)	0	(1,174,547,065)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	94,725,918,087	77,349,958,240	17,375,959,847	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,534,647,106	23,491,608,947	(7,956,961,841)	-
EKUITAS AKHIR	1,358,526,229,473	1,254,486,374,362	104,039,855,111	-

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2021
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UAPPB- : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 1:08 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	657,704,068
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	73,261,600
131111	Tanah	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	78,412,740,045
133111	Gedung dan Bangunan	242,611,045,704
134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	20,776,586,146
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(53,574,582,670)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27,895,365,541)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,551,077,091)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(79,235,432)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(860,628,800)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,537,500,000)
162151	Software	1,884,302,990
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6,489,666,928
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(6,183,876,937)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,067,695,765)
J U M L A H		1,358,523,702,235

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 1:20 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,689	77,320,563,531	139	1,124,753,714	5	32,577,200	11,823	78,412,740,045
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	35	798,515,620	0	0	0	0	35	798,515,620
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	68	9,109,477,500	0	0	0	0	68	9,109,477,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	12	40,373,000	0	0	0	0	12	40,373,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	82,825,000	0	0	0	0	23	82,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	2,300,000	0	0	0	0	2	2,300,000
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	9	34,083,005	0	0	0	0	9	34,083,005
30501	ALAT KANTOR	1,426	9,050,749,320	14	40,780,000	1	11,400,000	1,439	9,080,129,320
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,558	27,448,513,015	105	845,783,714	3	18,097,200	7,660	28,276,199,529
30601	ALAT STUDIO	262	7,437,835,594	1	20,900,000	0	0	263	7,458,735,594
30602	ALAT KOMUNIKASI	180	1,273,858,925	0	0	0	0	180	1,273,858,925
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	350	976,143,500	2	7,600,000	1	3,080,000	351	980,663,500
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	0	0	0	0	1	12,306,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	686,799,500	0	0	0	0	43	686,799,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,000	14,097,131,579	11	193,763,000	0	0	1,011	14,290,894,579
31002	PERALATAN KOMPUTER	551	3,806,209,173	5	9,427,000	0	0	556	3,815,636,173
31301	SUMUR	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31503	ALAT SAR	3	21,400,000	0	0	0	0	3	21,400,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	34	190,359,400	1	6,500,000	0	0	35	196,859,400
133111	Gedung dan Bangunan	66	239,994,199,536	1	3,803,257,344	0	1,186,411,176	67	242,611,045,704
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	37	167,625,372,448	0	80,000,000	0	997,692,518	37	166,707,679,930
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	64,662,613,761	0	39,255,344	0	94,584,680	26	64,607,284,425
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	7,706,213,327	1	3,684,002,000	0	94,133,978	4	11,296,081,349

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 1:20 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	6	1,227,766,300	0	0	1	49,000,000	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,405	7,090,315,928	2	14,480,000	6	615,129,000	1,401	6,489,666,928
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	6	615,129,000	15	1,882,714,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	304	2,010,629,282	1	11,400,000	0	0	305	2,022,029,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	850	418,230,966	0	0	0	0	850	418,230,966
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	12	36,818,500	0	0	0	0	12	36,818,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	1	3,080,000	0	0	3	3,242,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	19	10,503,882	0	0	0	0	19	10,503,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,425,822,435,985		4,942,491,058		1,883,117,376		1,428,881,809,667

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 1:09 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	15,777	78,732,177,420	147	1,129,840,952	12	37,137,200	15,912	79,824,881,172
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	35	798,515,620	0	0	0	0	35	798,515,620
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	68	9,109,477,500	0	0	0	0	68	9,109,477,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	12	40,373,000	0	0	0	0	12	40,373,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	82,825,000	0	0	0	0	23	82,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	2,425,000	0	0	0	0	3	2,425,000
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	10	34,783,005	0	0	0	0	10	34,783,005
30501	ALAT KANTOR	2,178	9,175,111,070	14	40,780,000	5	13,400,000	2,187	9,202,491,070
30502	ALAT RUMAH TANGGA	10,669	28,637,285,606	112	850,002,094	6	20,657,200	10,775	29,466,630,500
30601	ALAT STUDIO	311	7,472,829,842	1	20,900,000	0	0	312	7,493,729,842
30602	ALAT KOMUNIKASI	215	1,287,621,425	0	0	0	0	215	1,287,621,425
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	372	990,226,000	3	8,468,858	1	3,080,000	374	995,614,858
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	3	12,506,000	0	0	0	0	3	12,506,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	686,799,500	0	0	0	0	43	686,799,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,000	14,097,131,579	11	193,763,000	0	0	1,011	14,290,894,579
31002	PERALATAN KOMPUTER	575	3,822,554,473	5	9,427,000	0	0	580	3,831,981,473
31301	SUMUR	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31503	ALAT SAR	3	21,400,000	0	0	0	0	3	21,400,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	82	62,670,000	0	0	0	0	82	62,670,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	45	192,709,400	1	6,500,000	0	0	46	199,209,400
133111	Gedung dan Bangunan	66	239,994,199,536	1	3,803,257,344	0	1,186,411,176	67	242,611,045,704
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	37	167,625,372,448	0	80,000,000	0	997,692,518	37	166,707,679,930
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	64,662,613,761	0	39,255,344	0	94,584,680	26	64,607,284,425
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	7,706,213,327	1	3,684,002,000	0	94,133,978	4	11,296,081,349

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 1:09 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	6	1,227,766,300	0	0	1	49,000,000	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,422	7,093,784,238	6	16,480,000	6	615,129,000	1,422	6,495,135,238
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	6	615,129,000	15	1,882,714,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	304	2,010,629,282	5	13,400,000	0	0	309	2,024,029,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	857	421,699,266	0	0	0	0	857	421,699,266
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	22	36,818,510	0	0	0	0	22	36,818,510
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	1	3,080,000	0	0	3	3,242,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	19	10,503,882	0	0	0	0	19	10,503,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,427,237,518,184		4,949,578,296		1,887,677,376		1,430,299,419,104

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 1:09 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 30 JUNI 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	85	1,835,302,990	1	49,000,000	0	0	86	1,884,302,990
80101	ASET TAK BERWUJUD	85	1,835,302,990	1	49,000,000	0	0	86	1,884,302,990
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,835,302,990		49,000,000		0		1,884,302,990

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tanggal : 09/11/21 1:07 AM

UAPPB-E1 : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		86	1,884,302,990	923,667,478	144,028,287	0	1,067,695,765	816,607,225
80101	ASET TAK BERWUJUD		86	1,884,302,990	923,667,478	144,028,287	0	1,067,695,765	816,607,225
JUMLAH			86	1,884,302,990	923,667,478	144,028,287	0	1,067,695,765	816,607,225